



RENCANA KERJA TAHUN 2026 STASIUN PPMHKP MERAK

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat Rahmat-Nya, penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Stasiun PPMHKP Merak Tahun 2026 dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Stasiun PPMHKP Merak Tahun 2026 disusun berdasarkan acuan yang terdapat di dalam Rencana Strategis Stasiun PPMHKP Merak Tahun 2025-2029 dan pagu anggaran dari APBN Tahun 2026.

Dengan tersusunnya Rencana Kinerja Tahunan ini, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pegawai lingkup Stasiun PPMHKP Merak atas segala bantuan yang diberikan baik waktu, pikiran atau tenaga serta masukan.

Kami menyadari bahwa Rencana Kinerja Tahunan Stasiun PPMHKP Merak Tahun 2026 ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun diharapkan dapat memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.



Merak, Januari 2026

Iromo, S.IP
NIP.19691031 198903 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Ikhtisar Eksekutif	iii
BAB I . PENDAHULUAN	1
A. Potensi, Permasalahan dan Peran Organisasi	1
B. Keterkaitan RKT dengan Renstra	7
BAB II. RENCANA KINERJA TAHUN 2026	7
A. Tujuan Strategis	7
B. Sasaran Strategis dan IKU serta Target	8
BAB III. PENUTUP	13

LAMPIRAN

IKHTISAR EKSEKUTIF

Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merak merupakan Unit Pelaksana Teknis dibawah Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang mempunyai peran dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan di wilayah Negara Indonesia, terutama dalam memberikan jaminan kesehatan ikan mutu dan keamanan hasil perikanan. Adapun misinya yaitu “ Hasil perikanan yang sehat, bermutu, aman dan terpercaya”

Sesuai dengan Perpres Nomor : 2 Tahun 2025 merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dibawah BPPMHKP dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan. Serta secara administrasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

Tugas pokok Stasiun PPMHKP Merak adalah menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan Negara Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai visi tersebut dibutuhkan adanya keterkaitan antara Renstra dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Stasiun PPMHKP Merak Tahun 2025 – 2029, yaitu berupa serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang akan dilakukan setiap tahun dalam rangka mencapai sasaran, tujuan, dan visi organisasi.

Rencana Kinerja Tahun 2026 Stasiun PPMHKP Merak terdiri dari : Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (3989) dan Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPMHKP (3987), Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) meliputi :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN
HASIL PERIKANAN MERAK

RAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan lingkup Stasiun PPMHKP Merak (%)	72
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan lingkup Stasiun PPMHKP Merak (%)	72
		3.	Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI lingkup Stasiun PPMHKP Merak (Nilai)	71
SK.2	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan perikanan yang konsisten sesuai standar	4.	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Merak (%)	71
SK.3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Merak	5	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PPMHKP Merak (Indeks)	82,5
		6	Nilai Pembangunan Integritas lingkup Stasiun PPMHKP Merak (Nilai)	77
		7.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun PPMHKP Merak (Nilai)	86,2
		8.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun PPMHKP Merak (%)	86
		9.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun PPMHKP Merak (Nilai)	92,1
		10.	Nilai Kinerja Perencanaan Pelaksanaan Anggaran (NKPA) lingkup Stasiun PPMHKP Merak (Nilai)	71,75
		11.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup Stasiun PPMHKP Merak (%)	77
		12.	Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup Stasiun PPMHKP Merak (%)	3,5

Data Anggaran

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	416.225.000
2.	Terselenggaranya pengendalian system jaminan mutu dan keamanan Hasil Kelautan Perikanan yang konsisten sesuai standar	66.000.000
3.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	6.109.591.000
Total Anggaran Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merak Tahun 2026		6.591.816.000

Target Kinerja adalah keluaran dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun untuk setiap pekerjaan yang dilaksanakan pada tahun tersebut. Untuk lebih rincinya disajikan dalam Formulir dan Tabel Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2026 diatas.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Potensi, Permasalahan, dan Peran Organisasi

Mengacu pada kerangka pembangunan nasional, sistem perencanaan pembangunan Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini mendefinisikan sistem perencanaan sebagai tata cara untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh penyelenggara negara dan masyarakat. Sebagai bagian dari sistem ini, Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) memiliki posisi yang sangat strategis, dengan tujuan memastikan kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran. Renstra K/L adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang mengarahkan kebijakan dan program pembangunan lima tahunan, termasuk di bidang kelautan dan perikanan.

Penyusunan Renstra 2025-2029 di sektor kelautan dan perikanan ini juga berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029, yang mengatur tahapan perencanaan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Pengelolaan sektor kelautan dan perikanan Indonesia diharapkan dapat menciptakan keberlanjutan yang seimbang antara eksploitasi sumber daya dan pelestarian lingkungan.

Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 dirancang untuk mengoptimalkan pengelolaan sektor kelautan dan perikanan Indonesia dengan pendekatan berkelanjutan, yang mengedepankan kesejahteraan masyarakat pesisir serta meningkatkan daya saing produk kelautan di pasar global. Renstra ini berfokus pada implementasi konsep *Blue Economy*, yang menekankan pemanfaatan sumber daya laut secara bijaksana dan berkelanjutan, serta mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan garis pantai yang panjang dan kekayaan sumber daya laut yang melimpah, Indonesia memiliki potensi besar untuk memanfaatkan konsep ini dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan, yang akan berperan

penting dalam memperkuat posisi Indonesia di pasar internasional. Namun, di samping itu, hilirisasi produk kelautan dan perikanan akan menjadi salah satu strategi utama untuk meningkatkan daya saing sektor ini. Hilirisasi ini meliputi pengolahan produk perikanan menjadi barang yang bernilai lebih tinggi, yang tidak hanya mencakup produk makanan laut, tetapi juga produk sampingan seperti kosmetik dan bahan obat berbasis kelautan. Untuk memastikan produk-produk ini dapat bersaing di pasar global, penjaminan kualitas akan dilakukan dengan memperketat pengawasan mulai dari hulu hingga hilir, memastikan bahwa produk kelautan Indonesia memenuhi standar internasional dan ramah lingkungan.

Mengacu pada Peraturan Presiden No. 193 (Perpres 193), Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) memiliki tugas untuk menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu serta keamanan hasil kelautan dan perikanan. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, Renstra BPPMHKP 2025-2029 dirancang untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada, meningkatkan daya saing sektor kelautan dan perikanan Indonesia, serta memastikan keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi mendatang. Namun, tantangan yang dihadapi sektor kelautan dan perikanan Indonesia sangat kompleks, melibatkan isu-isu lingkungan yang kritis, rendahnya kualitas pengelolaan, dan keterbatasan infrastruktur yang memadai. Untuk itu, Renstra 2025-2029 tidak hanya sekadar menjadi perencanaan strategis, tetapi harus berfungsi sebagai upaya nyata untuk mengubah paradigma pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Fokus utama dari Renstra ini adalah mengarah pada pengelolaan yang lebih berkelanjutan dan berbasis kualitas.

Dalam konteks tersebut, Renstra BPPMHKP 2025-2029 harus lebih menekankan pada penerapan kebijakan yang mendukung peningkatan daya saing produk kelautan dengan memastikan standar mutu internasional diterapkan. Hal ini penting tidak hanya untuk pasar domestik tetapi juga untuk pasar internasional yang semakin menuntut kualitas yang lebih tinggi. Tidak hanya itu, upaya pengelolaan dan pengawasan yang lebih transparan juga akan memperkuat daya saing Indonesia dalam industri kelautan global. Tantangan tersebut menuntut kebijakan yang responsif terhadap perubahan dinamika pasar dan teknologi terbaru dalam pengolahan hasil perikanan, mendukung program peningkatan gizi anak yang menjadi salah satu prioritas nasional.

Dalam rangka mendukung renstra BPPMHKP 2025-2029 Stasiun PPMHKP Merak menginventarisasi permasalahan yang dihadapi dengan mengacu pada capaian kinerja pada tahun 2025. Adapun permasalahan tersebut sebagai berikut :
Masih kurangnya UPI sedangkan produksi budidaya dan hasil tangkapan ikan meningkat;

2. Sarana Pengangkutan hasil kelautan dan perikanan masih terbatas;
3. Sumberdaya manusia yang berkompeten dalam usaha pengolahan hasil kelautan dan perikanan masih kurang;

Arah dan kebijakan KKP Tahun 2026 dilaksanakan dengan prinsip ekonomi biru sebagaimana tuntutan pembangunan global, terdiri atas:

1. memperluas kawasan konservasi laut;
2. penangkapan ikan terukur berbasis kuota penangkapan ikan;
3. Pengembangan perikanan budi daya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan;
4. pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
<https://jdih.kkp.go.id>
5. pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau bulan cinta laut.

Arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tersebut akan diperkuat dengan:

1. peningkatan daya saing hasil kelautan dan perikanan yang didukung dengan penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk peningkatan konsumsi domestik dan ekspor;
2. peningkatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan *advanced technology*; dan
3. peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia kelautan dan perikanan.

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya kelautan dan perikanan dan menjadikan sektor ini sebagai *prime mover* pembangunan ekonomi nasional, diperlukan upaya percepatan dan terobosan dalam pembangunan kelautan dan perikanan yang didukung dengan kebijakan ekonomi serta iklim sosial politik yang kondusif. Dalam kaitan ini koordinasi dan dukungan lintas sektor serta para pemangku kepentingan lainnya menjadi salah satu prasyarat yang sangat penting.

Pembangunan kelautan dan perikanan memiliki banyak nilai strategis, antara lain:

1. Potensi geografis, ekonomi, sosial, dan ekologi yang sangat besar dan beragam dari perairan laut dan kepulauan di Indonesia, dapat menjadi modal sumberdaya alamiah yang besar bagi pembangunan bangsa Indonesia;
2. Sumber daya kelautan dan perikanan dapat menjadi basis pembangunan ekonomi secara berkelanjutan;
3. Pengembangan industri kelautan dan perikanan dapat menciptakan *backward* dan *forward linkage* industri yang tinggi.
4. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dunia, peningkatan permintaan akan produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan kesadaran akan gizi ikan yang lebih sehat dapat menjadi peluang pengembangan pasar bagi komoditas dan produk perikanan Indonesia;
5. Melalui penguasaan dan penegakan kedaulatan kelautan, maka pertahanan dan keamanan nasional dan kedaulatan wilayah dapat lebih terjamin;
6. Secara sosio-kultural kembali fokus ke pembangunan kelautan dan perikanan merupakan wujud upaya untuk mengembalikan kembali kejayaan maritim Indonesia yang pernah dicapai di masa lalu.

Melihat potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang begitu besar, maka tantangan lain yang timbul adalah maraknya kegiatan penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) oleh kapal-kapal ikan asing yang berdampak merugikan negara dan mengancam kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan. Ancaman *illegal fishing* kedepan diperkirakan intensitasnya terus meningkat, hal tersebut sejalan dengan kondisi perikanan global saat ini di beberapa negara yang mengalami penurunan stok ikan dan tingginya permintaan produk perikanan serta pengurangan armada kapal penangkapan ikan oleh berbagai negara akibat menyempitnya peluang izin penangkapan. Hal ini mendorong negara-negara disekitar Indonesia yang memiliki armada besar melakukan *illegal fishing* di perairan Indonesia dengan berbagai modus operandi serta menggunakan teknologi yang lebih canggih dan terkoordinir dengan baik, disisi lain kemampuan pengawasan SDKP di Indonesia masih sangat lemah dan perairan Indonesia sangat terbuka. Melihat ancaman dan tantangan tersebut, pengawasan SDKP perlu ditingkatkan sebagaimana amanat UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, melalui pengembangan sistem pemantauan SDKP, penyediaan sarana dan prasarana pengawasan, pemenuhan regulasi bidang pengawasan dan

kelembagaan di tingkat daerah serta kerjasama secara intensif dengan instansi lain dan menggalang komitmen serta dukungan internasional dalam penanggulangan *illegal fishing*.

Permasalahan lain yang dihadapi antara lain terkait dengan masih rendahnya produktivitas dan daya saing usaha kelautan dan perikanan yang antara lain disebabkan struktur armada yang masih didominasi oleh kapal berukuran kecil, belum terintegrasinya sistem produksi hulu dan hilir, dan masih terbatasnya sarana dan prasarana yang dibangun. Dalam pengembangan perikanan budidaya, masih dihadapkan pada permasalahan implementasi kebijakan tata ruang, terbatasnya prasarana saluran irigasi, terbatasnya ketersediaan dan distribusi induk dan benih unggul, serta adanya pencemaran yang mempengaruhi kualitas lingkungan perikanan budidaya. Indonesia juga masih menghadapi beberapa kondisi yang belum sepenuhnya dapat mendukung untuk memenuhi persyaratan mutu produk ekspor hasil perikanan yang semakin ketat dari negara pengimpor, seperti Uni Eropa. Disamping itu, aspek yang mempengaruhi lemahnya daya saing dan produktivitas yang sangat mendasar adalah dalam aspek kualitas SDM dan kelembagaannya. Dimana jumlah SDM yang bergantung pada kegiatan usaha kelautan dan perikanan sangat besar dan dengan pengetahuan, penguasaan teknologi dan kemampuan serta infrastruktur untuk akses informasi yang minim dan tidak merata di seluruh wilayah Indonesia yang berkepulauan. Diperparah oleh minimnya kelembagaan yang menaungi kegiatan usaha mereka dengan posisi tawar dan sistem organisasinya yang lemah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 28 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan bahwa Stasiun PPMHKP Merak merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dibawah BPPMHKP dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan. Serta secara administrasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

Tugas pokok Stasiun PPMHKP Merak adalah menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan

Negara Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan Perpres Nomor: 38 Tahun 2023, maka fungsi Stasiun PPMHKP Merak adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
2. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan
3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan
4. Pelaksanaan administrasi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

Susunan organisasi Stasiun PPMHKP Merak ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 28 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

Stasiun PPMHKP Merak dipimpin oleh seorang kepala merupakan unsur pelaksana teknis pusat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan susunan organisasi yang terdiri dari :

- a. Kepala Kantor
- b. Kelompok Kerja Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer ;
- c. Kelompok Kerja Pengawasan dan Pengawasan Mutu Pasca Panen ;
- d. Kelompok Kerja Dukungan Manajerial.

Kelompok Kerja Dukungan Manajerial mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga. Lingkup kerjanya meliputi Kepegawaian, Keuangan dan Umum.

Kelompok Kerja Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pasca Panen mempunyai tugas melakukan pemantauan terhadap mutu dan hasil kelautan dan perikanan, pengawasan dan surveilans terhadap mutu dan hasil kelautan dan

perikanan, inspeksi, verifikasi, surveilans, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu, penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium, penindakan pelanggaran, pengumpulan, pengolahan data dan informasi pengendalian dan pengawasan mutu dan hasil kelautan dan perikanan.

Kelompok Kerja Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer mempunyai tugas melakukan pencegahan, mutu dan hasil kelautan dan perikanan, dan keamanan hayati ikan, sertifikasi kesehatan ikan, sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, dan sertifikasi keamanan hayati (biosecurity).

B. Keterkaitan RKT dan Renstra

Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran dari Rencana Kerja yaitu berupa serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang akan dilakukan setiap tahun dalam rangka mencapai sasaran, tujuan, visi organisasi. Rencana Strategis merupakan rencana unggulan suatu organisasi yang akan dilakukan dan dicapai selama 5 tahun kedepan. Keterkaitan antara keduanya bahwa rencana kinerja tahunan merupakan pelaksanaan dari rencana strategis tersebut Stasiun PPMHKP Merak memiliki rencana strategis untuk meningkatkan produktifitas dan daya saing produk perikanan berbasis pengetahuan. Dengan sasaran yang akan dicapai akan meningkatkan sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang terpercaya dalam rangka mewujudkan kawasan perikanan budidaya yang bebas hama dan penyakit ikan berbahaya serta terjaminnya hasil perikanan yang aman dikonsumsi manusia. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut Stasiun PPMHKP Merak menjabarkan dalam rencana kinerja tahun 2026 sebagai berikut ; Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya BPPMHKP (3987), dan Pengendalian Mutu (3989).

BAB II

RENCANA KINERJA TAHUNAN

A. Tujuan Strategis

Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis, yaitu berupa serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang akan dilakukan setiap tahun dalam rangka mencapai sasaran, tujuan, visi organisasi. Beberapa manfaat yang dapat diidentifikasi dengan menyusun Rencana Kinerja Tahunan adalah sebagai berikut;

1. Kegiatan yang akan dilakukan akan berhasil baik bila direncanakan dengan baik dan matang ;
2. Rencana Kinerja Tahunan merupakan dasar untuk penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian dan Lembaga ;
3. Rencana Kinerja Tahunan dapat dijadikan acuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan;
4. Rencana Kinerja Tahunan dapat dijadikan pembanding dalam pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Stasiun PPMHKP Merak mengemban misi sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan;
2. Mendukung pengembangan teknik dan metoda pengendalian mutu hasil perikanan;
3. Mendukung pengembangan sistem informasi mutu hasil perikanan;
4. Menegakkan supremasi hukum terhadap peraturan perundangan mutu hasil perikanan;
5. Mengembangkan sistem administrasi perkantoran;

Tujuan adalah implementasi dari pernyataan misi dan merupakan hasil akhir yang akan dicapai. Adapun tujuan pembangunan Pengendalian Mutu adalah sebagai berikut :

1. Memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan melalui sertifikasi
2. Mengembangkan teknik dan sistem pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan
3. Meningkatkan pelayanan sertifikasi mutu melalui pemanfaatan sistim informasi
4. Meningkatkan pengawasan operasional pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan di Unit Pengelolaan Ikan
5. Meningkatkan peran serta pengguna jasa dalam pelaksanaan pengawasan mutu hasil perikanan
6. Mengembangkan pengelolaan administrasi di Stasiun PPMHKP Merak

B. Sasaran Strategis dan IKU Serta Target

Dalam rangka merealisasikan tujuan dan sasaran pembangunan Stasiun PPMHKP Merak yang telah ditetapkan dapat dicapai, maka harus ada kesepahaman definisi program, hasil (outcome), kegiatan, dan keluaran (output) untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan perikanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2026 dijelaskan sebagai berikut :

1. Program

Program merupakan penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi dan misi. Kementerian/Lembaga yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi inti eselon I atau unit Kementerian/Lembaga yang berisi kegiatan untuk mencapai hasil (output) dengan indikator kinerja terukur. Program Tahun 2026 melanjutkan nomenklatur dan jumlah program pada tahun 2026 sebanyak 1 (satu) program yang telah menggunakan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) sebagai salah satu upaya reformasi perencanaan dan penganggaran. RSPP diharapkan dapat mewujudkan implementasi kebijakan *money follow program priority*, memperkuat penerapan anggaran berbasis kinerja, meningkatkan integrasi belanja antar kementerian/Lembaga untuk tingkat Pemerintah Pusat, dan integrasi belanja pusat-daerah, serta mewujudkan

keselarasan rumusan nomenklatur program, kegiatan dan output kegiatan yang mencerminkan *real work* atau konkret.

2. Kegiatan

Kegiatan merupakan penjabaran dari program yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi satker atau penugasan tertentu Kementerian/Lembaga yang berisi komponen kegiatan untuk mencapai keluaran (output) dengan indikator kinerja yang terukur.

3. Hasil (*Outcome*)

Hasil (*Outcome*) adalah prestasi kerja yang berupa segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) dari kegiatan dalam satu program.

4. Keluaran (*Output*)

Keluaran (*Output*) adalah prestasi kerja berupa barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Program serta kebijakan.

Melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan ini diharapkan dapat dicapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan pada tahun yang bersangkutan. Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di Stasiun PPMHKP Merak pada tahun anggaran 2026 secara lengkap dapat dilihat pada Formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Rencana Kinerja Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Stasiun PPMHKP Merak Tahun 2025 – 2029, yang berisi rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2024 dan merupakan dokumen utama sebelum dilaksanakan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian dan Lembaga Tahun 2026.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) disusun setiap tahun dan memuat informasi tentang: (1) Program yang dijalankan pada tahun yang bersangkutan, (2) Kegiatan yang akan dijalankan, (3) Indikator Kegiatan yang akan dicapai, (4) Uraian Sub Kegiatan dan Pelaksanaan Pekerjaan, (5) Lokasi Pelaksanaan Kegiatan, (6). Target Kinerja yang akan dicapai

Target Kinerja adalah keluaran dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun untuk setiap pekerjaan yang dilaksanakan pada tahun tersebut untuk lebih rincinya disajikan dalam Formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Untuk mewujudkan sistem karantina ikan yang tangguh, berbasis peraturan perundangan yang kuat dalam suatu organisasi yang kompatibel, maka sasaran program yang akan dicapai adalah Meningkatnya Jaminan Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. **Indikator Kinerja Utama meliputi :**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Merak (%)	72
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Merak (%)	72
		3.	Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Wilayah RI lingkup Stasiun PPMHKP Merak	71
SK.2	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4.	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Merak (%)	71

SK.3	Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di Lingkungan Stasiun PPMHKP Merak	5	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Merak (Indeks)	82,5
		6.	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Merak (Nilai)	77
		7.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Merak (Nilai)	86,2
		8.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan KinerjaLingkup Stasiun PPMHKP Merak (Persen)	86
		9.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Merak (Nilai)	92,1
		10.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Merak (Nilai)	71,75
		11.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Merak (%)	77
		12.	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Merak (Indeks)	3,5

Data Anggaran 2026

1.	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	416.225.000
2.	Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang konsisten sesuai standar	66.000.000
3.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	6.109.591.000
Total Anggaran Stasiun PPMHKP Merak Tahun 2026		6.591.816.000

Dari sasaran program dan indikator kerja utama (IKU) tersebut di jabarkan lagi ke dalam sasaran kegiatan dan **Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)** sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Merak (%)
	2	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Merak (%)
	3	Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI lingkup Stasiun PPMHKP Merak (Nilai)
Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Merak (%)
Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di Lingkungan Stasiun PPMHKP Merak	5	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Merak (Indeks)
	6	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Merak (Nilai)
	7	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Merak (Nilai)

	8	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan KinerjaLingkup Stasiun PPMHKP Merak (Persen)
	9	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Merak (Nilai)
	10	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Merak (Nilai)
	11	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Merak (%)
	12	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Merak (Indeks)

BAB III

PENUTUP

Tugas pokok Stasiun PPMHKP Merak adalah menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan Negara Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis, yaitu berupa serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang akan dilakukan setiap tahun dalam rangka mencapai sasaran, tujuan, dan visi organisasi. Beberapa manfaat yang dapat diidentifikasi dengan menyusun Rencana Kinerja Tahunan adalah sebagai berikut ;

1. Kegiatan yang akan dilakukan akan berhasil baik bila direncanakan dengan baik dan matang ;
2. Rencana Kinerja Tahunan merupakan dasar untuk penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian dan Lembaga ;
3. Rencana Kinerja Tahunan dapat dijadikan acuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan;
4. Rencana Kinerja Tahunan dapat dijadikan pembanding dalam pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk mewujudkan sistem Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang tangguh, berbasis peraturan perundangan yang kuat dalam suatu organisasi yang kompatibel, maka sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. Terpenuhinya Kebutuhan Pembayaran Gaji Pegawai dan Operasional Perkantoran
2. Terciptanya SDM Mutu Yang Tangguh dan Profesional
3. Terwujudnya Sarana dan Prasarana Mutu Hasil Perikanan Yang Memadai
4. Penerapan Sistem Informasi Mutu Hasil Perikanan dalam Pelayanan
5. Tersedianya Teknik dan Metoda Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang Sesuai dengan Perkembangan Teknologi dan Mengacu Pada Standar Internasional

6. Terwujudnya Pranata dan Kelembagaan Birokrasi BPPMHKP yang Berkepribadian

Dalam rangka merealisasikan tujuan dan sasaran pembangunan Stasiun PPMHKP Merak yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan mengembangkan cara pencapaian tujuan dan sasaran melalui penetapan program dan kegiatan.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Stasiun PPMHKP Merak pada tahun anggaran 2026 secara lengkap dapat dilihat pada Formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Rencana Kinerja Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Stasiun PPMHKP Merak Tahun 2025 – 2029, yang berisi rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2026 dan merupakan dokumen utama sebelum dilaksanakan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian dan Lembaga Tahun 2026.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) disusun setiap tahun dan memuat informasi tentang: (1) Program yang dijalankan pada tahun yang bersangkutan, (2) Aktifitas yang akan dilaksanakan (3) Kerangka Rician Output yang akan di jalankan, (3) Rincian Output yang akan di capai, (4) Komponen dan Sub Komponen yang akan dikerjakan, (5) Detail pekerjaan untuk mencapai output, (6) Lokasi Pelaksanaan Kegiatan, (7). Target Kinerja yang akan dicapai

Target Kinerja adalah keluaran dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun untuk setiap pekerjaan yang dilaksanakan pada tahun tersebut untuk lebih rincinya disajikan dalam Tabel Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Dengan adanya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam menyusun RKA-KL Tahun 2026 dan melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2026. Sehingga semua program dan kegiatan yang telah direncanakan ditahun 2026 dapat terealisasi sesuai dengan sasaran strategis secara efektif dan efisien.



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAN www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN
DAN PERIKANAN MERAK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Iromo**
Jabatan : Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merak

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ishartini**
Jabatan : Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 5 Januari 2026

Pihak Kedua

Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ishartini

Pihak Pertama

Kepala Stasiun Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan Merak



Ditandatangani
Secara Elektronik

Iromo

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN
DAN PERIKANAN MERAK

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Merak (%)	72
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Merak (%)	72
		3.	Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Stasiun PPMHKP Merak (Nilai)	71
SK.2	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4.	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Merak (%)	71
SK.3	Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Merak	5.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Merak (Indeks)	82,5
		6.	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Merak (Nilai)	77
		7.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Merak (Nilai)	86,2
		8.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Merak (Persen)	86
		9.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Merak (Nilai)	92,1
		10.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Merak (Nilai)	71,75
		11.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Merak (%)	77
		12.	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Merak (Indeks)	3.5

Data Anggaran

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	416.225.000
2.	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	66.000.000
3	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Keamanan Hasil Perikanan	6.109.591.000
Total Anggaran Stasiun PPMHKP Merak Tahun 2026		6.591.816.000

Jakarta, 5 Januari 2026

Pihak Kedua

Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ishartini

Pihak Pertama

Kepala Stasiun Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan Merak



Ditandatangani
Secara Elektronik

Iromo

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026

KEMEN/LEMB (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG (13) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA (649688) STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MERAK
ALOKASI Rp. 6,164,013,000

Halaman : 1

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
032.13.EC 3989 3989.PDC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sertifikasi Produk[Base Line]	79.0 produk		314,108,000 248,108,000 213,765,000	
3989.PDC.002 051 A 521211	Lokasi : BANTEN Produk kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang divalidasi Validasi produk pada sektor produksi pasca panen Sertifikasi Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) Belanja Bahan (KPPN.020-Serang) > Sosialisasi Sertifikasi Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) - Perlengkapan Kegiatan Sosialisasi Sertifikasi Penertapan Distribusi Ikan (SPDI) - Konsumsi dan Snack Kegiatan (2 x 30 org)	79.0 produk 1.0 PKT 60.0 PKT		213,765,000 213,765,000 20,009,000 9,359,000 9,359,000 6,359,000 3,000,000	U A PNP
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.020-Serang) - Perdin	1.0 OK	10,650,000	10,650,000	*
B	Persentase Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) diterbitkan pada Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan Menengah Besar			33,436,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.020-Serang) - Perdin	1.0 OK	33,436,000	33,436,000	*
C	Jumlah Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI (sertifikat)			160,320,000	
521821	Belanja Barang Persediaan bahan baku (KPPN.020-Serang) - Belanja Bahan Laboratorium	3.0 PKT	50,000,000	150,000,000	A PNP
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.020-Serang) > Inspeksi/Verifikasi/Surveillance - Transport (2org x 1Keg) - Uang Harian (2 ORG x 1 HR X 13Keg)	2.0 OK 26.0 OH	350,000 370,000	700,000 9,620,000	*
3989.PDF	Sertifikasi Lembaga[Base Line]	14.0 Lembaga, Badan Usaha		19,343,000	
3989.PDF.002 051 A	Lokasi : BANTEN Lembaga kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang divalidasi Validasi Sertifikasi Produksi Primer Sertifikasi CBIB pada Pembudidaya Ikan	14.0 Lembaga		19,343,000 19,343,000 12,882,000	U

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026

KEMEN/LEMB	(032)	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG	(13)	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA	(649688)	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MERAK
ALOKASI	Rp. 6,164,013,000	

Halaman : 2

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.020-Serang) > Sosialisasi Sertifikasi Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) - Perlengkapan Kegiatan Sosialisasi SPDI kepada Masyarakat/kelompok Usaha - Konsumsi dan Snack Kegiatan (2 x 35 org)	1.0 PKT 70.0 PKT	2,632,000 50,000	6,132,000 6,132,000 2,632,000 3,500,000	RM
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.020-Serang) - Honorarium Narasumber	3.0 OJ	900,000	2,700,000 2,700,000	RM
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.020-Serang) > Perjalanan Inspeksi/Verifikasi/Surveillance Banten - Uang Harian Inspeksi (4 ORG X 2HR X 1 Keg) - Transport (4org x 1 Keg)	8.0 OH 4.0 OK	250,000 250,000	3,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000	RM
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.020-Serang) - Perjalanan Peserta CBIB	21.0 OK	50,000	1,050,000 1,050,000	RM
B	<i>Sertifikasi CPIB pada Pembenihan</i>			1,605,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.020-Serang) - Snack Kegiatan Dialog/Diskusi dengan Pengelola/Pelaku usaha/Masyarakat	33.0 PKT	25,000	825,000 825,000	RM
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.020-Serang) > Perjalanan Inspeksi/Verifikasi/Surveillance Banten - Uang Harian Inspeksi (2 ORG X 1HR X 2 Keg)	4.0 OH	195,000	780,000 780,000 780,000	RM
D	<i>Sertifikasi CPOIB dan CDOIB</i>			2,730,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.020-Serang) - Bahan Penunjang Kegiatan - Snack Kegiatan Dialog/Diskusi dengan Pengelola/Pelaku usaha/Masyarakat	1.0 PKT 33.0 PKT	205,000 25,000	1,030,000 205,000 825,000	RM
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.020-Serang) > Perjalanan Inspeksi/Verifikasi/Surveillance Banten - Uang Harian Inspeksi (1 ORG X 1HR X 5 Keg)	5.0 OH	340,000	1,700,000 1,700,000 1,700,000	RM
E	<i>Sertifikasi CPIB Kapal Perikanan</i>			2,126,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.020-Serang) - Bahan Penunjang Kegiatan - Snack dan Konsumsi Kegiatan Dialog/Diskusi dengan Pengelola/Pelaku usaha/Masyarakat	1.0 PKT 33.0 PKT	401,000 25,000	1,226,000 401,000 825,000	RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026

KEMEN/LEMB	(032)	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG	(13)	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA	(649688)	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MERAK
ALOKASI	Rp. 6,164,013,000	

Halaman : 3

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.020-Serang) > Perjalanan Inspeksi/Verifikasi/Surveillance Banten - Uang Harian Surveillance (1 LOKASI X 3 ORG)	3.0 OH	300,000	900,000 900,000 900,000	RM
3989.QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk[Base Line]	2.0 Produk		8,000,000	
	Lokasi : BANTEN				
3989.QIA.001	Hasil Perikanan di wilayah RI yang diawasi mutunya	2.0 Produk		8,000,000	U
051	Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik			8,000,000	
A	Penjaminan Mutu hasil perikanan domestik			8,000,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.020-Serang) - Biaya Pembelian Sampel (2 LOKASI X 2 Keg)	4.0 PKT	860,000	3,440,000 3,440,000	A *
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.020-Serang) > Perjalanan Pengawasan - Transport (2 ORG X 4 Keg) - Uang Harian (2 ORG X 1HR X 4 Keg)	8.0 OK 8.0 OH	200,000 370,000	4,560,000 4,560,000 1,600,000 2,960,000	A *
3989.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga[Base Line]	10.0 Lembaga		7,000,000	
	Lokasi : BANTEN				
3989.QIC.002	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	8.0 Lembaga		5,000,000	U
051	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan			5,000,000	
A	Evaluasi Kesesuaian Penerbitan HC Pada UPI			5,000,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.020-Serang) - Perlengkapan Evaluasi Kegiatan Surveilien - Belanja Bahan Konsumsi dan Snack Evaluasi Kegiatan Surveilien (2 Keg X 35 Org)	1.0 PKT 70.0 PKT	800,000 60,000	5,000,000 800,000 4,200,000	A *
3989.QIC.003	unit produksi primer yang konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan	2.0 Lembaga		2,000,000	U
051	unit produksi primer yang konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan			2,000,000	
A	Jumlah UPI yang konsisten Menerapkan SJMKHP			2,000,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.020-Serang) - Belanja Bahan Sampel Ikan hasil Penangkapan dan Obat Ikan	2.0 PKT	1,000,000	2,000,000 2,000,000	A *
7010	Manajemen Mutu			66,000,000	
7010.PBR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan[Base Line]	1.0 Rekomendasi Kebijakan		30,500,000	
	Lokasi : BANTEN				
7010.PBR.001	Rekomendasi Kebijakan Parameter uji yang terakreditasi di laboratorium acuan dan penguji sektor kelautan perikanan	1.0 Rekomendasi Kebijakan		30,500,000	U
051	Penguatan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Penguji			30,500,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026

KEMEN/LEMB	(032)	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG	(13)	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA	(649688)	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MERAK
ALOKASI	Rp. 6,164,013,000	

Halaman : 4

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	<i>Penguatan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi ISO 17020</i>			30,500,000	
522191	<i>Belanja Jasa Lainnya</i> (KPPN.020-Serang)			22,000,000	A PNP
	- Iuran Tahunan	1.0 PKT	1,500,000	1,500,000	*
	- Biaya Permohonan Reakreditasi	1.0 PKT	5,000,000	5,000,000	*
	- Biaya Surveiln dan Penambahan Ruang Lingkup (2 ORG x 3 HR)	4.0 PKT	3,500,000	14,000,000	*
	- Biaya Pertanggunggutan	1.0 PKT	1,500,000	1,500,000	*
524111	<i>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</i> (KPPN.020-Serang)			8,500,000	A PNP
	> Perjalanan Dinas Asessor			8,500,000	
	- Uang Harian Asessor (2 ORG x 3 HR)	6.0 OH	370,000	2,220,000	*
	- Penginapan Perjalanan Dinas Asessor (2 ORG x 2 HR)	4.0 OH	800,000	3,200,000	*
	- Transport/Ticket Asessor	2.0 OK	1,540,000	3,080,000	*
7010.PDD	<i>Standarisasi Lembaga[Base Line]</i>	1.0 Lembaga		35,500,000	
7010.PDD.002	Lokasi : BANTEN Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu Laboratorium	1.0 Lembaga		35,500,000	
051	Penguatan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi			35,500,000	U
A	<i>Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium (17025)</i>			35,500,000	
522191	<i>Belanja Jasa Lainnya</i> (KPPN.020-Serang)			29,500,000	A PNP
	- Biaya Uji Banding	6.0 PKT	1,500,000	9,000,000	*
	- Iuran Tahunan	1.0 PKT	1,500,000	1,500,000	
	- Biaya Permohonan Akreditasi	1.0 PKT	5,000,000	5,000,000	
	- Biaya Assessment dan Penambahan Ruang Lingkup (2 ORG X 2 HR)	4.0 PKT	3,500,000	14,000,000	*
524111	<i>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</i> (KPPN.020-Serang)			6,000,000	A PNP
	> Perjalanan Dinas Asessor			6,000,000	
	- Uang Harian (2 ORG X 2 HR)	4.0 OH	370,000	1,480,000	*
	- Penginapan (2 ORG X 1 HR)	2.0 OH	1,000,000	2,000,000	*
	- Transport	2.0 OK	1,260,000	2,520,000	*
032.13.WA	Program Dukungan Manajemen			5,849,905,000	
3987	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan			5,849,905,000	
3987.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	3.0 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		5,849,905,000	
3987.EBA.962	Lokasi : BANTEN Layanan Umum	2.0 Layanan		47,386,000	
051	Layanan Umum dan Rumah Tangga			47,386,000	U

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026

KEMEN/LEMB	(032)	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG	(13)	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA	(649688)	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MERAK
ALOKASI	Rp. 6,164,013,000	

Halaman : 5

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	<i>Operasional Umum</i>			17,102,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.020-Serang)			6,626,000	RM
	- Sarana Kebersihan Kantor	1.0 THN	626,000	626,000	
	- ATK dan Komputer Supplies	1.0 THN	6,000,000	6,000,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.020-Serang)			10,476,000	RM
	> Perjalanan Koordinasi Luar Kota/Propinsi			7,176,000	
	- Penginapan (1 ORG x 2 HR x 2 KL)	4.0 OH	620,000	2,480,000	
	- Uang Harian (1 ORG x 3 HR x 2 KL)	6.0 OH	530,000	3,180,000	
	- Transport (1 ORG x 2 KL)	2.0 OK	758,000	1,516,000	
	> Perjalanan Koordinasi Dalam Propinsi			3,300,000	
	- Uang Harian (1 ORG x 1HR x 11 KL)	11.0 OH	300,000	3,300,000	
B	<i>Administrasi RTP dan Pengadaan Barang/Jasa</i>			1,200,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.020-Serang)			1,200,000	RM
	- Penggandaan	1.0 PKT	300,000	300,000	
	- Penjilidan	2.0 PKT	450,000	900,000	
C	<i>Rumah tangga</i>			12,198,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.020-Serang)			1,500,000	RM
	> Penyajian Laporan Kinerja, Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan			1,500,000	
	- Penggandaan dan Penjilidan	5.0 PKT	300,000	1,500,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.020-Serang)			10,698,000	RM
	> Perjalanan Penyusunan Laporan Keuangan			10,698,000	
	- Penginapan (2 ORG x 4 HR x 1 KL)	8.0 OH	700,000	5,600,000	
	- Uang Harian (2 ORG x 5 HR x 1 KL)	10.0 OH	430,000	4,300,000	
	- Transport (2 ORG x 1 KL)	2.0 OK	399,000	798,000	
D	<i>Pengelolaan Data</i>			860,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.020-Serang)			150,000	RM
	> Belanja Bahan Merak			150,000	
	- Penggandaan	1.0 PKT	150,000	150,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.020-Serang)			710,000	RM
	> Perjalanan Pengolahan Data dan Informasi			710,000	
	- Uang Harian (1 ORG x 2 HR x 1 KL)	2.0 OH	205,000	410,000	
	- Transport (1 ORG x 1 KL)	1.0 OK	300,000	300,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026

KEMEN/LEMB	(032)	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG	(13)	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA	(649688)	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MERAK
ALOKASI	Rp. 6,164,013,000	

Halaman : 6

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<i>F</i>	<i>Penata Usahaan SDM dan Jabatan Fungsional</i>			2,075,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u>			225,000	RM
	(KPPN.020-Serang)				
	> Belanja Bahan Merak			225,000	
	- Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	1.0 PKT	225,000	225,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>			1,850,000	RM
	(KPPN.020-Serang)				
	> Peningkatan Kompetensi Jabfung			1,850,000	
	- Uang Harian (5 ORG x 1 HR)	5.0 OH	370,000	1,850,000	
<i>G</i>	<i>Tata Usaha kantor</i>			11,600,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u>			600,000	RM
	(KPPN.020-Serang)				
	> Belanja Bahan Merak			600,000	
	- Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	2.0 PKT	300,000	600,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>			11,000,000	RM
	(KPPN.020-Serang)				
	> Kegiatan Ketatusahaan dan Perkantoran			11,000,000	
	- Uang Harian (2 ORG x 5 HR x 1 KL)	10.0 OH	430,000	4,300,000	
	- Transport (2 ORG X 1 Keg)	2.0 OK	550,000	1,100,000	
	- Penginapan (2 ORG x 4 HR x 1 KL)	8.0 OH	700,000	5,600,000	
<i>H</i>	<i>Penyusunan RKAKL dan Data Dukung</i>			421,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u>			421,000	RM
	(KPPN.020-Serang)				
	> Belanja Bahan Merak			421,000	
	- Belanja Bahan Penunjang kegiatan Penyusunan RKAKL	1.0 PKT	421,000	421,000	
<i>I</i>	<i>Evaluasi dan Pelaporan</i>			360,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u>			360,000	RM
	(KPPN.020-Serang)				
	> Belanja Bahan Merak			360,000	
	- Belanja Bahan Penunjang Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan	1.0 PKT	360,000	360,000	
<i>J</i>	<i>Layanan Manajemen Keuangan</i>			1,570,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u>			850,000	RM
	(KPPN.020-Serang)				
	> Belanja Bahan Merak			850,000	
	- Belanja Bahan Penunjang Kegiatan Keuangan	1.0 PKT	160,000	160,000	
	- Penggandaan dan Penjilidan	3.0 PKT	230,000	690,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u>			720,000	RM
	(KPPN.020-Serang)				
	- Transport KPPN, UAW Merak	6.0 OK	120,000	720,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(032)

(13)

(649688)

Rp. 6,164,013,000

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MERAK

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3987.EBA.994	Layanan Perkantoran	1.0 Layanan		5,802,519,000	
001	Gaji dan Tunjangan			4,947,413,000	U
A	Pembayaran gaji dan tunjangan			3,304,124,000	
511111	Belanja Gaji Pokok PNS			1,638,781,000	RM
	(KPPN.020-Serang)				
	- Belanja Gaji Pokok PNS	1.0 THN	1,395,605,908	1,395,605,000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	121,588,000	121,588,000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	121,588,000	121,588,000	
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS			38,000	RM
	(KPPN.020-Serang)				
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.0 THN	30,000	30,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	4,000	4,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	4,000	4,000	
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS			114,800,000	RM
	(KPPN.020-Serang)				
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1.0 THN	98,400,000	98,400,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	8,200,000	8,200,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	8,200,000	8,200,000	
511122	Belanja Tunj. Anak PNS			35,000,000	RM
	(KPPN.020-Serang)				
	- Belanja Tunj. Anak PNS	1.0 THN	30,000,000	30,000,000	
	- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	2,500,000	2,500,000	
	- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	2,500,000	2,500,000	
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS			20,300,000	RM
	(KPPN.020-Serang)				
	- Belanja Tunjangan Struktural PNS	1.0 THN	17,400,000	17,400,000	
	- Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	1,450,000	1,450,000	
	- Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	1,450,000	1,450,000	
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS			117,600,000	RM
	(KPPN.020-Serang)				
	- Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1.0 THN	100,800,000	100,800,000	
	- Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	8,400,000	8,400,000	
	- Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	8,400,000	8,400,000	
511125	Belanja Tunj. PPh PNS			16,978,000	RM
	(KPPN.020-Serang)				
	- Belanja Tunjangan PPh PNS	1.0 THN	5,888,000	5,888,000	
	- Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	5,545,000	5,545,000	
	- Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	5,545,000	5,545,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026

KEMEN/LEMB	(032)	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG	(13)	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA	(649688)	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MERAK
ALOKASI	Rp. 6,164,013,000	

Halaman : 8

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511126	<u>Belanja Tunj. Beras PNS</u> (KPPN.020-Serang)			93,587,000	RM
	- Belanja Tunj Beras PNS	1.0 THN	93,587,000	93,587,000	
511129	<u>Belanja Uang Makan PNS</u> (KPPN.020-Serang)			199,000,000	RM
	- Belanja Uang Makan PNS	1.0 THN	199,000,000	199,000,000	
511151	<u>Belanja Tunjangan Umum PNS</u> (KPPN.020-Serang)			26,040,000	RM
	- Belanja Tunjangan Umum PNS	1.0 THN	22,320,000	22,320,000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	1,860,000	1,860,000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	1,860,000	1,860,000	
512211	<u>Belanja Uang Lembur</u> (KPPN.020-Serang)			42,000,000	RM
	- Belanja Lembur PNS	1.0 THN	42,000,000	42,000,000	
512411	<u>Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)</u> (KPPN.020-Serang)			1,000,000,000	RM
	- Belanja Tunjangan Kinerja	1.0 THN	1,000,000,000	1,000,000,000	
B	<i>Pembayaran gaji dan tunjangan PPPK</i>			1,643,289,000	
511611	<u>Belanja Gaji Pokok PPPK</u> (KPPN.020-Serang)			920,598,000	RM
	- Belanja Gaji Pokok PPPK	1.0 THN	789,084,000	789,084,000	
	- Belanja Gaji Pokok PPPK (gaji ke 13)	1.0 BLN	65,757,000	65,757,000	
	- Belanja Gaji Pokok PPPK (gaji ke 14)	1.0 BLN	65,757,000	65,757,000	
511619	<u>Belanja Pembulatan Gaji PPPK</u> (KPPN.020-Serang)			16,000	RM
	- Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.0 THN	12,000	12,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PPPK (gaji ke 13)	1.0 BLN	2,000	2,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PPPK (gaji ke 14)	1.0 BLN	2,000	2,000	
511621	<u>Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK</u> (KPPN.020-Serang)			92,092,000	RM
	- Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	1.0 THN	78,936,000	78,936,000	
	- Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK (gaji ke 13)	1.0 BLN	6,578,000	6,578,000	
	- Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK (gaji ke 14)	1.0 BLN	6,578,000	6,578,000	
511622	<u>Belanja Tunjangan Anak PPPK</u> (KPPN.020-Serang)			18,676,000	RM
	- Belanja Tunjangan Anak PPPK	1.0 THN	16,008,000	16,008,000	
	- Belanja Tunjangan Anak PPPK (gaji ke 13)	1.0 BLN	1,334,000	1,334,000	
	- Belanja Tunjangan Anak PPPK (gaji ke 14)	1.0 BLN	1,334,000	1,334,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026

KEMEN/LEMB	(032)	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG	(13)	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA	(649688)	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MERAK
ALOKASI	Rp. 6,164,013,000	

Halaman : 9

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511625	<u>Belanja Tunjangan Beras PPPK</u> (KPPN.020-Serang)			59,984,000	RM
	- Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.0 THN	59,984,000	59,984,000	
511628	<u>Belanja Uang Makan PPPK</u> (KPPN.020-Serang)			100,963,000	RM
	- Belanja Uang Makan PPPK	1.0 THN	100,963,000	100,963,000	
511633	<u>Belanja Tunjangan Umum PPPK</u> (KPPN.020-Serang)			57,960,000	RM
	- Belanja Tunjangan Umum PPPK	1.0 THN	49,680,000	49,680,000	
	- Belanja Tunjangan Umum PPPK (gaji ke 13)	1.0 BLN	4,140,000	4,140,000	
	- Belanja Tunjangan Umum PPPK (gaji ke 14)	1.0 BLN	4,140,000	4,140,000	
512414	<u>Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK</u> (KPPN.020-Serang)			393,000,000	RM
	- Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	1.0 THN	393,000,000	393,000,000	
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			855,106,000	U
A	LANGGANAN DAYA DAN JASA			153,871,000	
522111	<u>Belanja Langganan Listrik</u> (KPPN.020-Serang)			108,000,000	RM
	- Langganan Listrik Merak	1.0 THN	108,000,000	108,000,000	
522112	<u>Belanja Langganan Telepon</u> (KPPN.020-Serang)			3,871,000	RM
	- Langganan Telepon	1.0 THN	3,871,400	3,871,000	
522113	<u>Belanja Langganan Air</u> (KPPN.020-Serang)			42,000,000	RM
	- Langganan Air	12.0 BLN	3,500,000	42,000,000	
B	PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA-2			31,108,000	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.020-Serang)			2,380,000	RM
	- Pengurusan STNK Kendaraan Roda-2	7.0 UNIT	340,000	2,380,000	
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.020-Serang)			28,728,000	RM
	- Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda-2	7.0 UNIT	4,104,000	28,728,000	
C	PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA-4			133,840,000	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.020-Serang)			15,040,000	RM
	- Pengurusan STNK Kendaraan Roda-4	4.0 UNIT	3,760,000	15,040,000	
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.020-Serang)			118,800,000	RM
	- Biaya Pemeliharaan Operasional Kendaraan Roda-4	4.0 UNIT	29,700,000	118,800,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026

KEMEN/LEMB	(032)	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG	(13)	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA	(649688)	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MERAK
ALOKASI	Rp. 6,164,013,000	

Halaman : 10

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<i>F</i>	<i>PERAWATAN PERALATAN KANTOR</i>			40,199,000	
522191	<u>Belanja Jasa Lainnya</u> (KPPN.020-Serang)			22,649,000	RM
	- Kalibrasi Alat Laboratorium	1.0 Pkt	22,649,000	22,649,000	
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.020-Serang)			17,550,000	RM
	- Pemeliharaan Printer	18.0 UNIT	200,000	3,600,000	
	- Pemeliharaan Komputer	24.0 UNIT	150,000	3,600,000	
	- Pemeliharaan Genset 60 KVA	1.0 UNIT	4,950,000	4,950,000	
	- Pemeliharaan AC	18.0 UNIT	300,000	5,400,000	
<i>G</i>	<i>PEMELIHARAAN GEDUNG</i>			43,384,000	
523111	<u>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.020-Serang)			43,384,000	RM
	- Pemeliharaan Gedung Tingkat 2	180.0 M2	100,225	18,040,000	
	- Pemeliharaan Gedung	176.0 M2	144,000	25,344,000	
<i>H</i>	<i>OPERASIONAL PERKANTORAN</i>			172,024,000	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.020-Serang)			130,344,000	RM
	- Langganan Zoom Meeting	12.0 BLN	500,000	6,000,000	
	- Layanan Internet Merak	12.0 BLN	4,500,000	54,000,000	
	- keperluan Sehari-hari Perkantoran Merak	1.0 THN	36,232,000	36,232,000	
	- Jamuan Tamu	1.0 THN	13,712,000	13,712,000	
	- Langganan Aplikasi Layanan Publik	1.0 THN	10,400,000	10,400,000	
	- Biaya E-Tol Pimpinan	1.0 THN	10,000,000	10,000,000	
521114	<u>Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat</u> (KPPN.020-Serang)			1,680,000	RM
	- Biaya Pengiriman POS	12.0 BLN	140,000	1,680,000	
522141	<u>Belanja Sewa</u> (KPPN.020-Serang)			40,000,000	RM
	- Biaya Sewa Rumah Arsip	1.0 THN	40,000,000	40,000,000	
<i>I</i>	<i>HONOR PENGELOLA</i>			101,280,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026

KEMEN/LEMB	(032)	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG	(13)	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA	(649688)	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MERAK
ALOKASI	Rp. 6,164,013,000	

Halaman : 11

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521115	<u>Belanja Honor Operasional Satuan Kerja</u> (KPPN.020-Serang) > HONOR PENGELOLA ANGGARAN (pagu dana diatas Rp. 1 Miliar s.d Rp. 10 Miliar) - Kuasa Pengguna Anggaran 12.0 OB 1,180,000 14,160,000 - Pejabat Pembuat Komitmen 12.0 OB 1,150,000 13,800,000 - Penandatanganan SPM 12.0 OB 470,000 5,640,000 - Bendahara Pengeluaran 12.0 OB 410,000 4,920,000 - Staf Pengelola Anggaran (5 org X 12 bln) 60.0 OB 300,000 18,000,000 > HONOR PENGELOLA PNBP 23,640,000 - Atasan Langsung Bendahara Pengelola PNBP 12.0 OB 540,000 6,480,000 - Bendahara Penerima 12.0 OB 440,000 5,280,000 - Anggota PNBP (3 org) 36.0 OB 330,000 11,880,000 > HONOR PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI TINGKAT UAKPA 8,400,000 - Penanggung Jawab 12.0 OB 200,000 2,400,000 - Koordinator 12.0 OB 200,000 2,400,000 - Anggota (2 org X 12 bln) 24.0 OB 150,000 3,600,000 > HONOR PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI TINGKAT UAPPA-W 8,400,000 - Penanggung Jawab 12.0 OB 200,000 2,400,000 - Koordinator 12.0 OB 200,000 2,400,000 - Anggota (2 org X 12 bln) 24.0 OB 150,000 3,600,000 > HONOR PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA 4,320,000 - Pengurus Penyimpanan BMN (2 org X 12 bln) 24.0 OB 180,000 4,320,000 J <u>Tenaga Kontrak dan Outsourcing</u> 179,400,000				RM
522191	<u>Belanja Jasa Lainnya</u> (KPPN.020-Serang) - Jasa Outsourcing/PJLP (3 ORG x 13 BLN) 39.0 OB 4,600,000 179,400,000				RM

Catatan : 1. U = Komponen Utama
 2. P = Komponen Penunjang
 3. * = Blokir

Cilegon, 4 Mei 2026